

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS
PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA TAHUN 2018 DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

DEWI PURNAMA SARI

NPM :1621020233

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS
PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA TAHUN 2018
DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

DEWI PURNAMA SARI

NPM: 1621020233

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr.Maimun, S.H., M.A

Pembimbing II: Dani Amran Hakim, S.H, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya ditulis Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu berperan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas sesuai dengan peraturan Pemilu secara menyeluruh. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Lampung tidak bersifat diskriminatif, peran dan fungsi Bawaslu Provinsi Lampung bertugas mengawasi setiap proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Rumusan masalah dari judul skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2018 di Provinsi Lampung? 2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2018 di Provinsi Lampung?. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari membaca referensi dari buku-buku terkait dengan pengawasan pemilu. Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilu tahun 2018 di Provinsi Lampung yaitu, pelanggaran administrasi sebanyak 331 laporan/temuan, pelanggaran kode etik sebanyak 3 laporan/temuan, pelanggaran ASN 50 laporan/temuan, serta kategori bukan pelanggaran sebanyak 121 laporan/temuan. Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah cukup berperan dan efektif, namun kinerja Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran belum optimal karena Bawaslu tidak mempunyai wewenang untuk menangani suatu pelanggaran dalam hal ini Bawaslu hanya merekomendasikan kepada KPU, kepolisian dan DKPP, dan menurut *fiqh siyasah* yang diatur dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang mana mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Purnama Sari
NPM : 1621020233
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 April 2020
Penulis,



Dewi Purnama Sari
NPM: 1621020233



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, B. Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Dewi Purnama Sari
NPM : 1621020223
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Maimun.S.H. M.A
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II

Dani Amran Hakim. S.H. MH
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Frenky, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, B. Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)"** Disusun oleh : **Dewi Purnama Sari, NPM : 1621020233, Program Studi: Hukum Tata Negara Siyasah Syar'iyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis 17 Desember 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H



**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
196210221993031002**

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ {ال عمران (٣): ١٠٤}

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”
(QS. Al-Imraan[3]: 104)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabilamin rasa syukurku kepada Allah SWT yang telah mempermudah serta memberi aku kelancaran mengerjakan hasil karya ini, dan aku persembahkan rasa terimakasihku kepada orang-orang yang telah membantuku serta do'a yang selalu diberikan.:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah(Santari) dan Mama (Kasmini) yang telah membesarkan dan mendidik sedari aku kecil hingga sekarang. Terimakasih sudah menjadi support system yang luar biasa, dan selalu mendoakan yang terbaik disetiap langkahku.
2. Kepada adik-adikku tercinta Ahmad Ibnu Faris dan Ray Ibnu Ramadhan. Support sistem setelah ayah dan mama yang selalu ngasih semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dewi Purnama Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Januari 1999, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Santari dan Ibu Kasmini. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Darul Fallah pada tahun 2004, setelah itu penulis melanjutkan studi di SDN 1 Keteguhan Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010 kemudian melanjutkan studi di SMPN 15 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013 dan melanjutkan studi di SMAS Perintis Dua Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



Dewi Purnama Sari
NPM : 1621020233

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung) sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M. Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A selaku pembimbing I yang sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing II yang sangat baik

dan telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada Tim Munasqosyah Bapak Frengki, M.Si selaku ketua sidang, Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku penguji 1, Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku sekretaris sidang.
7. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
8. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terealisasi skripsi ini
9. Ayah (Santari) dan Mama (Kasmini) dan adik tersayang yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Suci, Dinda, Anggi, Tiya, Nabila, Sarah, Nindy, Fariz, Bagus, Guntur, Sofwan terimakasih sudah saling membantu satu sama lain, saling mendukung dan saling pengertian. Terimakasih sudah menjadi cerita dimasa perkuliahan.
11. Trisella, Nindy, Dila, Viki, Sari, Feby sahabat-sahabat sedari kecil yang selalu mendukung, dan juga menjadi moodbooster disaat jenuh. Terimakasih guys.
12. Teman-temanku satu angkatan 2016 khususnya Jurusan Hukum Tata Negara kelas E terimakasih untuk kalian semua yang telah mengisi masa-masa kuliahku dengan penuh warna.

13. Teman-teman KKN 81 yang super baik , yang juga selalu mendukung dan support satu sama lain. Terimakasih sekali, See u top guys!

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.



Bandar Lampung, 15 April 2020
Penulis,

Dewi Purnama Sari
NPM. 1621020233

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilu pada Tahun 2018 di Provinsi Lampung (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan³
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

² Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prananda Media Group:2014), h. 4.

³ Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni,2005), h. 240.

⁴https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum diunduh pada (10 Januari 2020 19.54 Wib)

5. Pengawasan merupakan penilikan dan penjagaan.⁵
6. Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁶
7. Provinsi merupakan wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur⁷

Dari pengertian dan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, dapat di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah menganalisis Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Provinsi Lampung dalam tinjauan *Fiqh siyasah*.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan untuk meneliti masalah ini untuk dijadikan karya ilmiah antara lain:

1. Alasan Objektif
 - a. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian untuk meninjau yang dimaksud peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung
 - b. Untuk menambah informasi bahwa peran bawaslu itu cukup efektif atau tidak dalam melakukan pengawasan pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 774.

⁶ Kancil, *Pemilihan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 4.

⁷ *Ibid*, h. 1108.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini sesuai dengan latar belakang atau relevansi keilmuan yang penulis tekuni, yaitu Jurusan *Siyasah* dalam lingkungan UIN Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya ditulis Pemilukada merupakan sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Di Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada dilaksanakan secara langsung sebagai wujud sistem demokrasi. Terdapat dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung itu perlu. Pertama, untuk lebih mempermudah kehendak mayoritas masyarakat dalam pemilihan kepada daerah. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbicara tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) baik langsung maupun melalui perwakilan (DPRD), maka pembahasan akan terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat vital dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, sebab pimpinan yang akan mengatur, menertibkan dan menjalankan hukum secara baik dan benar dalam masyarakatnya. Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil adalah tujuan, sedangkan pemilu adalah alat (*wasilah*), Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, mengangkat seorang pemimpin adalah suatu keharusan, pemilu merupakan satu cara yang di tempuh untuk memilih pemimpin.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dengan merujuk pada ketentuan pasal 22E ayat (2) UUD 1945, karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam ketentuan pemerintahan daerah pada ketentuan pasal 18 UUD ayat (4) 1945. Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawasan Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dengan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah

dilantik. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dengan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.⁸

Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Lampung yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan pada pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 an. H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si dan Bachtiar Basri, SH.,MM, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 an. Drs.H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 an. Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 an, Dr. H. Mustafa dan H.Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari periode sebelumnya karena mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Gubernur tahun 2018 yaitu, pelanggaran administrasi sebanyak 331 laporan/temuan, pelanggaran kode etik sebanyak 3 laporan/temuan, pelanggaran ASN 50 laporan/temuan,serta kategori bukan pelanggaran sebanyak 121 laporan/temuan. Dari kasus tersebut yang menguatkan data peneliti dalam meneliti kasus pelanggaran pemilu yang di

⁸ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2017, h.24.

tangani oleh Bawaslu di Provinsi Lampung yang sampai saat ini masih banyak mengalami masalah yang sama dan diduga dilakukan oleh oknum-oknum pasangan calon gubernur lampung tahun 2018

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu berperan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan peraturan Pemilu secara menyeluruh. Oleh karena itu, selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung difungsikan sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk dan indikasi kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Provinsi Lampung tidak bersifat diskriminatif, peran dan fungsi Bawaslu Provinsi Lampung selain sebagai pengawasan pelaksanaan kampanye, Bawaslu dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung bertugas mengawasi setiap proses dan tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, serta menindak lanjuti setiap laporan-laporan dan indikasi kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Pemilu merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai wakil/pemimpin mereka. Sedangkan perihal tentang prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka seperti yang terjadi di era Khulafah Rasyidin dulu atau melalui pemungkutan suara (*vote*) seperti yang berlaku saat ini adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu.

Suksesi kepemimpinan dalam Islam, terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya. Rasulullah menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang alami. Sedangkan sahabat Abu Bakar yang mengganti Rasulullah sebagai khalifah pertama melalui dukungan beberapa orang tokoh, terutama dari kalangan Muhajirin dalam peristiwa Tsaqifah Bani Sai'dah; diawali oleh Umar Bin Khattab, diikuti oleh Utsma Bin Affan, kemudian yang lainnya.

Pemilu adalah kreasi peradaban perpolitikan modern. Karena itu ia tidak dikenal dalam sejarah politik Islam. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa pemilu tidak bertentangan dengan Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam, yakni tentang konsep *as-syura* atau musyawarah. '*Syura*' secara harfiah berarti 'saling memberi saran',

rembukan (*mutual consultation*), yang memang tidak harus selalu dengan mulut (*verbal*), langsung (*direct*). Untuk keperluan musyawarah melibatkan orang puluhan juta bahkan ratusan juta orang, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka *syura* salah satu bentuk pemilihan (*voting*) yang diciptakan oleh akal budi umat manusia dewasa ini sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.

Peran Bawaslu dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini, mempunyai tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017. Maka dari itu penulis ingin menelaah atau mengkaji tentang peranan Bawaslu dalam mengawasi persiapan Pemilukada Serentak tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi peneliti untuk membahasnya pada skripsi yang berjudul judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)”

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung dalam tinjauan *fiqh siyasah*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung.

G. Signifikan/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji mengenai Peran Badan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai peran Bawaslu dalam Mengawasi Pemilu pada Tahun 2018 di Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan di atas, digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.⁹ Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.¹⁰ Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara empiris dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif memperlajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.¹¹ Peneliti

⁹ Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Pt Rineka Cipta), h. 118.

¹⁰ Arikunto, Suharsim, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 10.

¹¹ *Ibid.*

ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*). Pengambilan data dari tempat yang menjadi subjek penelitian langsung yaitu kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2018 di Provinsi Lampung.

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

a. Partisipan

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan fakta.

- 1) Bagian dari Bawaslu Provinsi Lampung 2017-2022.
- 2) Terlibat dalam penetapan strategi Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022.
- 3) Terlibat dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2018.
- 4) Mengetahui banyak informasi terkait pemilu pada tahun 2018.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan

kriteria-kriteria penetapan sampel penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Dwi Zaen Prasetyo, S.H	26 Tahun	Staf Kasubag Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Lampung bagian penanganan pelanggaran
2.	Ricky Ardian, S.I.P., M.I.P	28 Tahun	Staff Kasubag TP3 Bawaslu Provinsi Lampung bagian pengawasan pelaksanaan pemilu

b. Lokasi Penelitian

Bawaslu provinsi Lampung berlokasi di Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh penulis.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹² Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam

¹² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 195.

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data,yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan orisinal.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang terkait termasuk hasil wawancara dengan informan mengenai peran Bawaslu dalam Mengawasi Pemilu pada Tahun 2018 di Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti , pencatatan atau peaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel serta bahan media online yang terkait dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.

¹³ E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, Lpsp3 UI, 1983), h. 29.

¹⁴ Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset Bagaimana Menulis dan Meneliti* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 148.

¹⁵ Nur Indriatono dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 147.

Maka untuk teknik pengumpulan data melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk meyakinkan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjabar pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.¹⁶ Dalam skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan staff anggota Bawaslu Provinsi Lampung secara terbuka dan mendalam (*dept interview*).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁷ Dalam hal ini yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu pada tahun 2018 di Provinsi Lampung.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 141.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang di dapat sudah cukup dalam penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagai berikut:¹⁸

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam krangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang diakhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

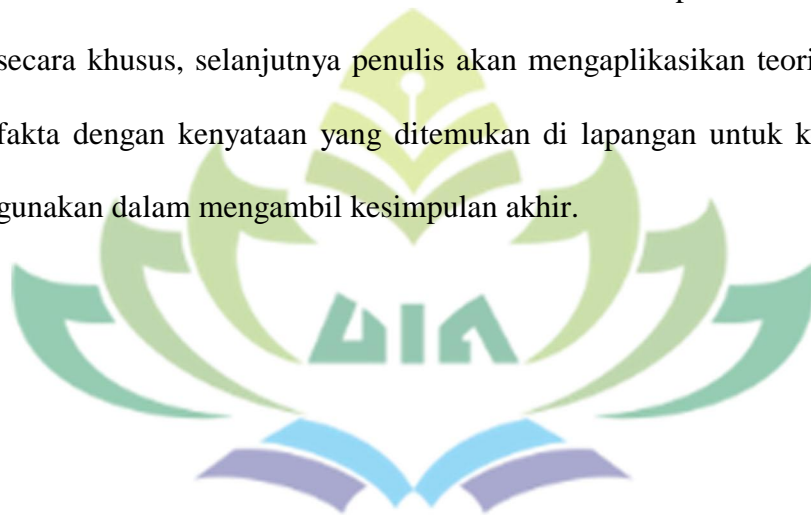
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menguunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para

¹⁸ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, h. 243.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), h. 104.

narasumber atau informan.²⁰ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²¹ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.²²

Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³ Dalam mengolah hasil data penulis menggunakan metode pendekatan secara induktif yakni berangkat dari fakta-fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penulis akan mengaplikasikan teori dan fakta-fakta dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.



²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 105.

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004), Cet I, h. 127.

²² Susiadi, As., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 106.

²³ Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* dan *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah merupakan bentuk masdar dari "ساسة" artinya mengatur, mengurus, politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah.²⁴ Menurut Ibnu Manzhur *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah peraturan perundang yang mengatur berbagai hal.²⁵

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul Wahhab Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²⁶

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi

²⁴ Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr), h. 108.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 4.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syariyyah An Nizam Ad-Dauliyah Al-Islamiyyah Ad-Dusuriyyah Wa Al-Khariyyah Wa- Al Dauliyyah* (Mesir: Dar Al Ansor, 1997), h.15.

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat dikemukakan bahwa hakikat *siyasah syar'iyah* sesungguhnya :

- a. Berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*uli al-amr*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²⁸

Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁹ Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Siyasah syar'iyah sangat erat hubungannya dengan *fiqh*. *Fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* semacam ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya *fiqh* tidak sama dengan ilmu karena *fiqh* bersifat zanni yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa Arab *fiqh* berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan

²⁷ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin* (Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif, 1993), h. 10.

²⁸ *Ibid*, h.11.

²⁹ *Ibid*.

dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut hukum fiqh.³⁰ Tetapi Saifuddin Al-Amidiy memberikan definisi *fiqh* yang berbeda dengan definisi di atas yaitu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*. Sedangkan ilmu mengandung pengertian sesuatu yang pasti atau *qath'iy*.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum Allah SWT yang didasarkan kepada dalil berisi tentang hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah tafsili* seorang mujtahid atau *fiqh* yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau faqih.³¹

Secara keilmuan *syar'iyah* fiqh itu banyak macamnya di antaranya ada yang disebut dengan *fiqh siyasah*, yaitu: ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam I Indonesia*, Cetakan Ke 19 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 48-50.

³¹ Amir Syariuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5.

untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

2. Pengertian *fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat.³²

Definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Penting dicatat, dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*.³³ Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari

³² *Ibid*, h. 12.

³³ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin*, h. 13-14.

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya terdapat pada tujuannya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

3. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menentang lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- 2) Ekonomi dan militer (*siyasah maliyyah*).
- 3) Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- 4) Hukum perang (*siyasah harbiyyah*).
- 5) Administrasi negara (*siyasah idariyyah*).³⁴

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, M.Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), h. 4.

Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam Muhammad Amin meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.³⁵ Sementara Abdul Wahab Khallaf dalam Solichin Abdul Wahab lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁶

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Moneter/Ekonomi).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negar).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*alsiyasah al-dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian entang penetapan hukum (*tasyi'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh lembaga birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non-muslim (*al-siyasah*

³⁵ Muhammad Amin, *Ijrihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* Jilid IX (Jakarta: Inis, 1991), h. 15.

³⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 9.

³⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta : Maddah, 2000), h. 8.

al-duali al-'am) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat, baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan “pen” pada awal kalimat dan mendapat akhiran “an” menjadi pengawasan yang artinya penilikan atau penjagaan.³⁸

Lord Action mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan bertindak kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Maka, wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus kearah diktaktor tanpa batas yang bearti bertentangan dengan ciri di negara hukum.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 108.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.³⁹

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang diyakini bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Allah berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ
 مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا

³⁹ Sujatmo, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 12

أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾ {المجادلة (٥٨): ٧}

Artinya “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain sebagainya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan

atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁴⁰

Keberadaan lembaga pengawas pemilu harus diposisikan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan sebetulnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu.

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan pemilu mesti melekat atau berjalan seiring dengan pelaksanaan pemilu. Hanya saja, karena banyak pihak yang belum percaya bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, maka fungsi pengawasan itu diberikan kepada lembaga tersendiri. Jadi, pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggaraan pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan.⁴¹

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan sistem

⁴⁰P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dan Metode Praktek* (Jakarta Melton Putra, 2011), h. 94.

⁴¹ Tim Peneliti Perludem, *Evektivitas Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2006), h. 65.

pengawasan efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).⁴²

Teori pengawasan menurut beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Sujatmo dalam bukunya, sebagai berikut.

- a. Menurut Lynda f. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
- b. Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya.
- c. Menurut Sondang Saigian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
- d. Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁴³

Berdasarkan pengertian dari peran ahli tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau perorangan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

2. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan

⁴² Sujatmo, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 56.

⁴³ *Ibid*, h. 56.

peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang bersih, bebas kecurangan dan aman.

Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :⁴⁴

- a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- d. Mendeteksi Adanya Kecurangan.

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil *output* yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁴⁵

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang

⁴⁴ Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Teori dan Metode Pengawasan* (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka. 2007) h. 44.

⁴⁵ *ibid.* h. 45.

mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*al-mulk at-taba'i*)
- b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al mulk as-siyasi*).⁴⁶

Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang nya (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan, kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu *pertama*, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Quran dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. *Kedua*, Negara hukum sekuler (*as-siyasah al-'aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagian hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. *Ketiga*, Negara ala “republik” plato (*as-siyasah al-madaniyyah*), merupakan suatu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

Fiqh siyasah adalah aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum “*Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Implementasinya pada periode Madinah dan Masa Kini, (Bogor, Kencana, 2003), h. 13.

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil *output* yang sesuai dengan syarat-syarat system. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁴⁸

Panwaslu adalah panitia yang bertugas mengawasi pelanggaran Pemilu baik ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati (melihat dan mencatat hasil amatan), mengkaji (melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format) (5W + 1H), memeriksa (sesuai aturan dengan pelaksana), menilai (benar atau salah serta konsekunsi), proses penyelenggaraan pemilu, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.⁴⁹

Tujuan umum dari pengawasan pemilu adalah menegakkan, kredibilitas penyelenggaraa, transparansi penyelenggara serta akuntabilitas hasil pemilu. Mewujudan pemilu dengan demokratis, dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. Selain itu pengawas pemilu mempunyai tugas untuk menemukan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan tempat terjadinya

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), h.4

⁴⁸ *Ibid*, h. 45.

⁴⁹ Bawaslu DKI Jakarta, *Undang-Undang Pemilu* (Jakarta : 2011), h. 9.

pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu menyampaikan temuan dan atau laporan kepada instansi yang berwenang.⁵⁰

3. Panitia Pengawas Pemilu dalam Konsep *Fiqh Siyasah*

a. Konsep Pengawasan dalam *Fiqh Siyasah*

Banyak istilah dalam *fiqh siyasah* yang menunjukkan fungsi dan tugas seperti halnya Panwaslu di Indonesia. *Abd al-Qadir Awdah* menyebutkan *al-muraqabah wa al-taqwim*. Sedangkan al-Mawardi menyebutkan wilayah *al-hisbah*. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai otoritas pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem kenegaraan.

Al-Muraqabah wa al-taqwim menurut Awdah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Kekuasaan pengawasan ini, menurut Awdah didasari atas dua hal, yakni, *pertama*, kewajiban pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan bagian dari *al-amr bi al ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* yang telah diwajibkan oleh Allah. *Kedua*, kekuasaan yang dimiliki pemerintah padadasarnya merupakan kekuasaan rakyat yang diwakilkan kepada mereka. Atas dasar tersebut, maka penguasa (pemerintah) memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.⁵¹

⁵⁰ Bawaslu DKI Jakarta, *Kompilasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: 2012), h. 16.

⁵¹ Awdah, *Al-Islam Wa Awduna*. h.196.

Sedangkan *al-Mawardi* menjelaskan fungsi pengawasan lebih menyelur dengan menggunakan istilah wilayah *al-hisbah*. *Wilayah al-hisbah* berasal dari kata *al-Wilayah* yang mempunyai arti kekuasaan atau kewenangan. Sedangkan *al-Hisbah* memiliki banyak arti yang berbeda yang disesuaikan dengan kontek penggunaannya. *Al-hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan, pengawasan dan penghitungan.⁵² *Al-Hisbah* merupakan suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* (menyuruh orang agar senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah melakukan perbuatan buruk). Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.⁵³

Oleh sebab itu penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang yang di pandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Orang yang di angkat menjadi petugas *al-Hisbah* bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.⁵⁴ Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dengan menambahkan dalam definisi Wilayah *al-Hisbah* yang

⁵² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008). h. 1939.

⁵³ A. Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 61.

⁵⁴ *Ibid.*, h.62.

kewenangannya tidak termasuk dalam wewenang penguasa, peradilan biasa dan *Wila'yah al-Ma'zolim*.⁵⁵

Dasar hukum yang melandasi tugas-tugas *amr ma'ruf nahy munkar*, baik yang dilakukan pribadi maupun melalui suatu lembaga, seperti wilayah *al-hisbah*, cukup banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah di antaranya Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ {العمران (٣): ١٠٤}

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ

⁵⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008). h. 1939.

وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ {الأعراف (٧): ١٥٧}

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim mempunyai peran aktif dalam ber-*amr ma'ruf nahly munkar*. Namun menurut kesepakatan ulama' *fiqh*, bentuk kewajiban *amr ma'ruf nahly munkar* merupakan kewajiban kolektif bagi umat islam (*wajib kifayah*). Maka ketika tugas *amr ma'ruf nahly munkar* hanya dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu‘ anhu, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِيزْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “ Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallah bersabda, barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan

lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (H.R Muslim)⁵⁶

1. Sejarah wilayah Al-Hisbah

Negara telah diperintahkan agar melembagakan suatu ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban *amr ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dapat dilihat pada masa Rasulullah di samping beliau memperhatikan akhlak yang mulia, Rasulullah juga memperhatikan pelebagaan penegakan dan pelestarian dengan memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan *amr ma'ruf nahi munkar*. Beliau sendiri, juga sering kali melakukan inspeksi pasar untuk meninjau apakah para pedagang melakukan kecurangan atau tidak, setiap kali beliau menemukan orang yang sedang melakukan kecurangan, beliau pasti langsung melarangnya.⁵⁷

Tugas yang beliau emban baik dalam kepastiannya sebagai nabi ataupun sebagai kepala Negara. Dalam hal ini nabi disebut sebagai *al-Muhtasib* pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah, maka beliau menunjuk sahabat Sa'ad Ibn al-'Ash ibn Umayyah sebagai *al-Muhtasib* di Makkah dan Umar Bin Khattab di Madinah.⁵⁸

Tindakan Rasulullah SAW dalam mendelegasikan tugas *al-Hisbah* kepada para sahabat dianggap oleh ulama' *fiqh* sebagai cikal

⁵⁶ Al-Imam Abu al-Hasain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, *Shahih Muslim*, (terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim*), Jilid, III, cet. 1, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah,2010), h. 290.

⁵⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 21.

⁵⁸ *Ibid*, h. 21.

bakal Wilayah *al-Hisbah*. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa pelanggar kasus-kasus yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar perlu ditangani secara serius. Penanganan kasus *al-Hisbah* di zaman Abu Bakar as-Siddiq tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, meskipun kadang-kadang didelegasikan kepada Umar bin Khattab.⁵⁹

Pada zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan secara tegas mulai dilakukan. Untuk wilayah *al-hisbah*, Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang *al-Muhtasib*, antara lain Sa'ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Ummi al-Syifa' (wanita) yang disebut terakhir sebagai *al-Muhtasib* untuk mengawasi para pedagang di pasar Madinah.⁶⁰

Secara umum lembaga wilayah *al-hisbah* berlanjut hingga pada masa dinasti Umayyah (661-750). Wilayah *al-hisbah* pada periode ini sudah menjadi suatu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang kewenangannya mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Setelah *Dawlah Islamiyah* runtuh dan digantikan oleh *Dawlah Abbasiyah* dari kurun waktu 750 M-1225 M (132 H-656 H), keberadaan lembaga ini pada masa periode Abbasiyah sudah melembaga seperti

⁵⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1940.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 1940.

lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan.⁶¹

Demikian juga wilayah *al-hisbah* menjadi departemen penting selama kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ayyub, dan Utmaniyah. Di India, meskipun departemen wilayah *al-hisbah* yang resmi tidak ada, namun selama masa kesultanan, *al-Muhtasib* dan *qadi* sama-sama ditunjuk setiap kali ada wilayah baru yang dikuasai oleh Negara. Lembaga wilayah *al-hisbah* masih tetap populer sepanjang sejarah umat Islam, meskipun terdapat perbedaan nama di berbagai tempat. Misalnya, provinsi-provinsi timur dan barat Baghdad, petugas pelaksanaannya disebut *al-Muhtasib*, di Afrika Utara disebut *Shahib al-Suq*, di Turki disebut *Muhtasib Aghasi* dan di India disebut *Kotwal*.⁶² Sedangkan di Indonesia tugas pengawasan ini memiliki istilah yang berbeda dalam masing-masing departemen, misalnya dalam perangkat Pemilihan Umum diistilahkan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

2. Tugas Wilayah *Al-Hisbah*

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-hisbah* yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak

⁶¹Iin Solikhin, "Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam" Jurnal Ibda, Vol. III, No. 1 (2005), h.12.

⁶²*Ibid*, h.13.

boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.⁶³

Dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Imam Mawardi menjelaskan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian.⁶⁴

- 1) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- 2) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- 3) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.⁶⁵

Wilayah *al-hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini berfungsi untuk memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau diluar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta lantaran sewaannya membebani unta, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau

⁶³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 96.

⁶⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah* h. 235-249.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 235-249.

meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bias menghalangi jalanan lalu lintas dan berakibat jalan menjadi sempit.⁶⁶

Jadi, wilayah *al-hisbah* mempunyai tugas agar menjaga amr ma'ruf nahi munkar, tidak ada perkara syari'at yang luput dari pehatiannya. Wilayah *al-Hisbah* merupakan lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

3. Wewenang Wilayah *Al-Hisbah*

Di samping wilayah *al-hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan membina, wilayah *al-hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Ulama' *fiqh* menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-hisbah* dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*.⁶⁷

Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* diharuskan agar memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak

⁶⁶ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum* h. 99.

⁶⁷ Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* h. 14.

efektif ataupun tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁶⁸

Namun seorang *al-muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan juga diperbolehkan untuk memberikan suatu keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. Akan *tetapi al-muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena hal yang demikian merupakan tugas dari hakim peradilan.⁶⁹ Oleh karena itu, para *al-muhtasib* bebas memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat. Menurut ulama' *fiqh*, *al-muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁷⁰

Fungsi pengawasan yang di miliki oleh Panwaslu hampir sama dengan lembaga *al-hisbah*. Sama-sama bertugas menjaga agar terciptanya amar ma'ruf nahi munkar dalam Sistem Tata Negara Islam, akan tetapi wilayah kewenangan yang dimiliki Panwaslu dalam menegakkan hukum hanya sebatas pada persoalan pelanggaran dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan Pemilihan Umum.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 14.

⁶⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam...* h. 1941.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 1941.

4. Dasar Hukum Pengawasan Pemilu

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga disebutkan satu lembaga lain yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas mengawasi perilaku dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Sebelumnya terkait dengan keberadaan dan kedudukan Panwaslu, termuat dalam putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 mengenai permohonan uji materi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain mengenai mekanisme pengusulan dan pengangkatan anggota Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 UU Nomor 22 Tahun 2007, selain ini terhadap ketentuan di atas, dalam pertimbangan hukum MK mengutip Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945 menentukan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri”. MK menyatakan bahwa kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut MK menyatakan bahwa fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi prinsip-prinsip Luber dan Jurdil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen anak mengancam prinsip-prinsip Luber dan Jurdil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Karena itu menurut MK Badan Pengawas Pemilihan Umum harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU, dan unsur pengawasan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu.

Berdasarkan dari putusan MK terkait pembahasan di atas membuahkan hasil dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berlaku sekarang, telah diperbaharui menjadi

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah adalah amanah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berkenaan dengan hal Pemilu lembaga Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu daerah tingkat kabupaten/kota memiliki peran yang penting di dalamnya yang struktural kelembagaannya memiliki garis koordinasi secara vertikal dengan Bawaslu Provinsi sampai dengan Bawaslu pusat yang bersifat Independen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam tingkat daerah kabupaten/kota pengawas pemilihan umum yaitu: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten atau Kota sebagai lembaga pengawas Pemilu bersifat (*ad hoc*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dasar hukum pengawasan dalam *fiqh siyasah*:


- 1) Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.

- 2) Al-hadits, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- 3) Kebijakan-kebijakan khulafah Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu Reorientasi.
- 4) Ijtihad ulama di dalam mencapai kemaslahatan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- 5) Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konversi.⁷¹

Kata-kata imam di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk *mufrad/tunggal* maupun dalam bentuk jamak atau yang diidhafahkan tidak kurang 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik. Allah SWT berfirman:

⁷¹ Muchtar Affandi, "*Ilmu-Ilmu Kenegaraan*", (Bandung: Alumni, 2014), h. 157.

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً
يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

{التوبة (٩): ٨} 

Artinya : “Bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang Fasik (tidak menepati perjanjian).”

Selain itu imamah bisa diartikan gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu pertama bersifat syar’i dan kedua bersifat *siyasi*.

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kemudian disingkat menjadi Pemilukada dan kemudian selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian

pemimpin.⁷² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang atau calon. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”. Dengan demikian kata pemilihan umum adalah pemilihan dengan cermat, teliti, seksama dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana tersedia bagi rakyat umum menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.⁷³

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberikannya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain mengatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakilkan mereka dalam hukum negeri (Parlemen). Ada pula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat atau sebagaimana memilih orang yang mereka kehendaki. Melalui pemilihan umum akan ditentukan siapa yang berhak menduduki jabatan, baik jabatan kepemimpinan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemilihan tersebut. Menurut Miriam Budiarto, pemilihan

⁷² Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jawa Barat : Gramata Publishing, 2014), h.1.

⁷³ *Ibid.* h. 1.

umum dapat diselenggarakan disegala tatanan sistem politik, baik itu di sistem politik demokrasi, otoriter, maupun totaliter.⁷⁴

Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilu maupun pilkada merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan. Secara ideal bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.⁷⁵

Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilihan umum merubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil pemilu adalah orang-orang terpilih mewakili rakyat dan bekerja dan atas nama rakyat. Dengan demikian, pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaiki nasib rakyat secara bersama-sama. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.⁷⁶

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah sebuah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk

⁷⁴ Rapung Samuddin, *Fikh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Islam dan Politik* (Jakarta : Cetakan Pertama, Gozian Press), h. 301-302.

⁷⁵ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 67.

⁷⁶ Hendra Budian, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu* (Yogyakarta Cet. 1, Pustaka Yustisia, 2015), h. 41.

Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Walikota untuk Kota.⁷⁷

Dengan demikian, pemilukada menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui *demokratisasi prosidural* tersebut rakyat sebagai pemenang kedaulatan akan *pertama*, memperbaharui kontrak sosial, *kedua*, memilih pemerintah baru, dan *ketiga* menaruh harapan baru dengan adanya pemerintah baru. Demokrasi dalam mekanisme rekrumen para pemimpin politik menjadi awal untuk mewujudkan hubungan kekuasaan yang serta tersebut karena para pemimpin politik inilah yang nantinya akan berperan sebagai *decision maker* dalam tata kelola pemerintahan daerah.⁷⁸

Melihat sedikit sejarah perjalanan Undang-Undang Pemilukada, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara *gradual* (berangsur-angsur) di masa awal reformasi menghasilkan reformasi politik yang cukup signifikan. Salah satu yang cukup penting dan tertuju dalam UUD NRI 1945 adalah diaturnya mekanisme pemilihan langsung untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis. Perubahan kedua UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat

⁷⁷ *Ibid*, h. 42.

⁷⁸ Moh.Mahfud Md, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 20.

luas dan memiliki dua makna yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) kedua-duanya demokratis.⁷⁹

Baik pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun demokrasi secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang lah yang menentukan apakah pemilihan kepala daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau dilakukan oleh DPRD, yang penting prinsip dasarnya adalah demokratis.⁸⁰

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat dua tafsiran dan frasa “dipilih secara demokratis”, yaitu dalam arti pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Amandemen UU NRI 1945 sesuai Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan dapat diartikan bahwa pemerintahan harus bersumber dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kedalatan dalam menentukan siapa yang menjadi kepala

⁷⁹ Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di pemilukada* (Yogyakarta : Cetakan Pertama, Rangkang Education, 2014), h. 80.

⁸⁰ Lomba Sultan “*Sistem Pemilihan Umum Daerah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*” Jurnal Al-Fikr, Vol.15 Nomor 2 Tahun 2011, h.156.

daerahnya.⁸¹Demikian juga terhadap tafsiran Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, yang mana dipilih secara demokrasi adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sedangkan Wakil kepala daerah tidak diharuskan satu paket dengan kepala daerah, sehingga posisi wakil kepala daerah dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah.

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara langsung (selanjutnya ditulis Pemilukada) yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2005 merupakan reformasi yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pemilukada pada hakikatnya adalah “pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat di setiap daerah memilih sendiri secara bebas dan rahasia siapa calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan menjadi pemimpin mereka.⁸²

Pemilukada langsung menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi segera mungkin segala kelemahan dalam pemilukada pada masa lalu. Pemilukada bermanfaat untuk menegaskan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan yang (*governance*) maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*).⁸³

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung itu demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih

⁸¹ *Ibid*, h.176.

⁸² Amiruddin dan A. Zaini Basri, *Pilkada Langsung : Problem dan Prospek* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 2

⁸³ Suharizal, *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta : Cetakan Ke 2, Pt Rajagrafindo Persada, 2012), h. 37.

membuka pintu bagi tampilannya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemilihan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Gagasan pemilihan umum kepala daerah secara langsung lahir dari keinginan agar kepala daerah terpilih benar-benar representatif, artinya seorang gubernur misalnya, terpilih atau dipilih bukan hasil rekayasa politik anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang pada akhirnya kepala daerah bukanlah hasil keinginan rakyat yang sebenarnya.⁸⁴

3. Pemilukada dalam Perspektif Islam

Kedudukan dan fungsi kepala daerah dalam pandangan Islam adalah sangat penting. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾
{النساء (٤): ٥٩}

⁸⁴ Noor M. Aziz, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), h. 69.

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Dalam Tafsir Jalalain diterangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur.

Dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan kepala daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah, meskipun Islam tidak menulis aturan khusus tentang pemilihan kepala daerah namun Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Di antaranya sejumlah prinsip utama dalam masalah pemilihan pemimpin adalah masalah keadilan. Berkaitan dengan keadilan, Al-Qur'an menetapkan kewajiban berlaku adil terhadap manusia sekalipun dengan menggunakan kekuatan. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ {النِّسَاء (٤): ٥٨}

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan

bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

Pemahaman dalam ayat ini, Ibnu Taimiyah berkata : “maksud dari mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, adalah agar manusia berlaku adil dalam menunaikan hak-hak makhluk-Nya, barang siapa yang menyimpang dari kitab-Nya, harus diluruskan dengan besi.”

Kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam syari’at Islam wajib dipertanggung jawabkan untuk mencegah kezaliman mereka kembali, sebagaimana yang ditunjukkan untuk mencegah kezaliman mereka kembali, sebagaimana yang ditunjukan oleh nash-nash Al-Qur’an dan Hadist-hadist Rasullallah SAW, perihal amar ma’ruf nahi mungkar, atau secara khusus perihal tugas pengawasan atas para pejabat pelaksana kewajiban yang merupakan tujuan semua kewenangan Islam.

Sunnah Allah juga memutuskan bahwa segala perkara manusia dalam dunia yang dilaksanakan dengan sikap adil sekalipun perkara dosa lebih sering sukses dibandingkan perkara yang dilakukan dengan sikap zalim sekalipun tidak dalam perkara dosa.⁸⁵

D. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

1. Pengertian Bawaslu

Badan pengawas pemilihan umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

⁸⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 20.

Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.⁸⁶

2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Lampung

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 93 tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
 - 1) Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih Sementara dan daftar pemilih tetap.
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - 3) Proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
 - 4) Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
 - 5) Pelaksanaan kampanye.
 - 6) Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan.
 - 8) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya.
 - 9) Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan, dan
 - 11) Proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- c. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKKP.

⁸⁶ Dokumentasi, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Dicatat Tanggal 05 Agustus 2020.

- d. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti.
- f. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- g. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi.
- h. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
- i. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- j. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 96 disebutkan bahwa:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penulisan penulis telah menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada yang pembahasan secara mendetail mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung (Studi Pada Bawaslu Provinsi Lampung) tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya adalah :

Pertama yang berhasil peneliti temukan adalah yang penelitian yang dilakukan oleh Arief Rizal dengan judul “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Bawaslu dalam sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia dan factor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia . Metode yang digunakan penulis terdahulu merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi pustaka studi dokumentasi dan wawancara, Hasil penelitian ini menemukan bahwa lembaga Bawaslu dari masa ke masa selalu dikuatkan dengan Undang-Undang baru, dengan merubah kedudukan serta menambah kewenangannya. Namun, lembaga ini masih saja mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan kewenangannya dalam sistem hukum pemilihan umum pada saat ini.⁸⁸

Kedua, yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Deni Wahyu Saputro dengan judul “Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan

⁸⁸ Arief Rizal, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 39.

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Metode yang digunakan penulis terdahulu adalah penelitian yuridis normatif dengan metode studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian skripsi terdahulu menemukan bahwa lembaga Bawaslu dari masa ke masa selalu dikuatkan dengan Undang-Undang baru, dengan merubah kedudukan serta menambah kewenangannya.⁸⁹

Ketiga, berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Rengga Abdurrahman Abadi dengan judul “Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati magetan tahun 2018. Metode yang digunakan penulis terdahulu adalah analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian skripsi terdahulu menunjukan adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 dapat ditemukan pada 1 tahap, yaitu tahap kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati magetan. Pelanggaran Kampanye yang terjadi pada

⁸⁹ Deni Wahyu Saputro, *Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung , 2018), h. 32.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh komisi pemilihan umum kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu kabupaten/kota Magetan.⁹⁰

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief Rizal.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief Rizal yakni sama-sama meneliti tentang Badan Pengawas Pemilu

Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti, peneliti menganalisis peran bawaslu dalam mengawasi pemilukada tahun 2018 di provinsi lampung, sedangkan dalam penelitian Arief Rizal meneliti tentang eksistensi badan pengawas pemilu dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia. Peneliti terdahulu tidak membahas tentang pandangan *fiqh siyasah* sedangkan peneliti membahas tentang pandangan *fiqh siyasah*.

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Deni Wahyu Saputro.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deni Wahyu Saputro adalah sama-sama membahas tentang pengawas pemilu.

Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang tugas, wewenang dan fungsi dari Bawaslu dalam pengawasan pemilu di Jawa Barat. Sedangkan peneliti menganalisis Peran Bawaslu dalam

⁹⁰ Rengga Abdurrahman Abadi, *Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 69.

Mengawasi Pemilukada 2018 di Provinsi Lampung. Peneliti terdahulu tidak membahas tentang pandangan *fiqh siyasah* sedangkan peneliti membahas tentang pandangan *fiqh siyasah*.

3. Persamaan dan perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rengga Abdurrahman Abadi .

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rengga Abdurrahman Abadi adalah sama-sama membahas tentang penerapan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Magetan.

Perbedaannya penelitian terdahulu mencari hambatan serta solusi dalam menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 di magetan. Peneliti terdahulu tidak membahas tentang pandangan *fiqh siyasah* sedangkan peneliti membahas tentang pandangan *fiqh siyasah*.

Berdasarkan penganalisaan peneliti pada hasil-hasil peneliti terdahulu, terdapat persamaan pada segi objek penelitiannya Bawaslu. Sedangkan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain, dari hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut jauh berbeda karena yang akan peneliti bahas mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi pemilukada berdasarkan pandangan *fiqh siyasah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Abd Al-Qadir Awdah, *Al Islami Wa Awda'una Al-Siyasah*, Beirut: Mu: Assah Al-Risalah, 1981.

Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Teori dan Metode Pengawasan*, Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka. 2007.

Abdulkadir. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Cet I, 2004.

Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin*, Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif, 1993.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, M.Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.

Al-Imam Abu al-Hasain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, *Shahih Muslim*, (terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim*), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, Jilid III, cet 1, 2010.

Amiruddin dan A. Zaini Basri, *Pilkada Langsung : Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Amin Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jilid IX, Jakarta: Inis, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008.

E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, Lpsp3 UI, 1983.

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Gunawan Suswantoro, *Mengawasl Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & Dkpp*, Penerbit: Erlangga, 2016.

Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Hendra Budian, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu*, Yogyakarta Cet. 1, Pustaka Yustisia, 2015.

Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Terj. Arif Maftuhin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Prananda Media Group: 2014.

Jhonny. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Kancil, *Pemilihan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kartono. Kartini, *Pengantar Metode Riset Social*, Bandung: Alumni, 1986.

Mawardi Irvan, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di pemilukada*, Yogyakarta : Cetakan Pertama, Rangkang Education, 2014.

Moh. Mahfud Md, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Muchtar Affandi, *"Ilmu-Ilmu Kenegaraan"*, Bandung: Alumni, 2014.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam I Indonesia*, Cetakan Ke 19, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997.

Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum *"Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Implementasinya pada periode Madinah dan Masa Kini, Bogor, Kencana, 2003.

Mudrajad. Kuncoro, *Metode Riset Bagaimana Menulis dan Meneliti*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Nawawi. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

- Noor M. Aziz, *Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Nur Indriatono dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dan Metode Praktek*, Jakarta Melton Putra, 2011.
- Rapung Samuddin, *Fikh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Islam dan Politik*, Jakarta : Cetakan Pertama, Gozian Press, 2017
- Romly, Al-Hisbah Al-Islamiah: *Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*, Sleman: Penerbit Deepublish, 2012.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2017.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jawa Barat : Gramata Publishing, 2014.
- Sujatmo, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Subagyo. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2011
- Suharsimi, Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Pt Rineka Cipta. 2002.
- Suharizal, *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta : Cetakan Ke 2, Pt Rajagrafindo Persada, 2012.
- Susiadi, As., *Metode Penelitian* , Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sujatmo, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Syariuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan ke 3, Jakarta: Kencana, 2010
- T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, Yogyakarta : Maddah, 2000.

Tim Peneliti Perludem, *Evektivitas Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2006.

Undang-Undang

Bawaslu DKI Jakarta, *Undang-Undang Pemilu*, Jakarta : 2011.

Bawaslu DKI Jakarta, *Kompilasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: 2012.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 12 Tahun 2017

Jurnal

Arief Rizal, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017).

Deni Wahyu Saputro, *Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung , 2018).

Hasrul Harahap, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015*, *Jurnal Renaissance* 2016.

Iin Solikhin, “*Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*” *Jurnal Ibda*, Vol. III, No. 1 tahun 2005.

Lomba Sultan “*Sistem Pemilihan Umum Daerah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*” *Jurnal Al-Fikr*, Vol.15 Nomor 2 Tahun 2011.

Rengga Abdurrahman Abadi, *Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019).

Wawancara

Ricky Ardian, S.I.P., M.I.P. Selaku Staff Teknis Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, *Wawancara* dengan penulis pada tanggal 11 Agustus 2020.

Dokumentasi, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, dicatat tanggal 12 Agustus 2020

Dokumentasi Tentang Laporan Akhir Bawaslu Provinsi Lampung 2018, dicatat tanggal 15 Agustus 2020.

Dwi Zaen Prasetyo, S.H Selaku Pelaksana Teknis Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung, *Wawancara* dengan penulis pada tanggal 15 Agustus 2020.

Sumber Online

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum diunduh pada (10 Januari 2020 19.54 WIB)

<https://lampung.tribunnews.com/2018/05/10/Total-190-Dugaan-Pelanggaran-Pilkada-Di-Lampung-Ini-Kasus-Terbanyak> diakses pada (10 Januari 2020 Pukul 19:54 WIB)

